

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2025

Nafissa Ulfiyah¹, Dwi Desvita Sari², Sri Ningsih³

Universitas Jambi ^{1,2,3}

Email: ulfiu763@gmail.com¹, dwiiidesvitasarii@gmail.com², sriningsih@unja.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 3 Bulan : Maret Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>The Open Unemployment Rate (OUR) is an important indicator in measuring regional labor market conditions. This study aims to analyze the development of the Open Unemployment Rate in Central Java Province during the period 2016-2025 and to identify the factors influencing its changes. The research uses a descriptive quantitative approach with trend analysis based on secondary data. The results indicate that the unemployment rate in Central Java was relatively stable from 2016 to 2019, increased significantly in 2020 due to the COVID-19 pandemic, and gradually declined from 2021 to 2025. This decline reflects economic recovery and the improvement of labor absorption in various sectors. The study concludes that economic stability, government policies, and industrial development play significant roles in reducing unemployment at the regional level.</i> Keyword: <i>Open Unemployment Rate, Central Java, employment, pandemic, economic recovery.</i>

Abstrak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan TPT Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016-2025 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis tren berdasarkan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa TPT Jawa Tengah relatif stabil pada periode 2016-2019, mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dan kemudian mengalami tren penurunan bertahap hingga tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan kembali aktivitas produksi serta penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan sektor industri memiliki peran penting dalam menekan angka pengangguran di tingkat daerah.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Jawa Tengah, ketenagakerjaan, pandemi, pemulihan ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, menurunnya daya beli masyarakat, serta berpotensi

memicu masalah sosial lainnya (Jessy Jeray¹, Satria Yoga Putra², 2023). Dalam konteks makroekonomi, pengangguran juga mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses produksi. Oleh karena itu, pengendalian tingkat pengangguran menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Secara teoritis, pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja melebihi jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, perubahan struktur ekonomi, serta adanya guncangan eksternal seperti krisis ekonomi atau pandemi. Stabilitas pasar tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan aktivitas produksi umumnya akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2023). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. TPT menjadi ukuran yang penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pasar kerja dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah.

Data TPT yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016–2025. Data tersebut kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan grafik tren perkembangan tingkat pengangguran selama sepuluh tahun terakhir. Grafik tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis deskriptif mengenai pola perubahan TPT sebelum pandemi, saat pandemi COVID-19, serta pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global. Oleh karena itu, analisis tren TPT dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menjadi penting untuk memahami bagaimana kondisi pasar kerja di Jawa Tengah berkembang dari waktu ke waktu.

Selain itu, periode 2016–2025 mencakup fase ekonomi yang relatif stabil sebelum pandemi, fase krisis akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, serta fase pemulihan

ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan menganalisis data selama satu dekade, artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data resmi BPS.

B. METODE PENELITIAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam perekonomian modern karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Dalam konteks ketenagakerjaan, pengangguran menggambarkan kondisi ketika sebagian angkatan kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun memiliki keinginan dan kesiapan untuk bekerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2023). Yang termasuk dalam kategori penganggur terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan sehingga berhenti mencari kerja. Konsep ini penting karena memberikan gambaran nyata mengenai proporsi tenaga kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif.

Dalam teori ekonomi makro, pengangguran tidak hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai indikator efisiensi pasar tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja belum berjalan secara optimal. Menurut Sukirno (2016), pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena proses pencarian kerja atau perpindahan pekerjaan. Jenis pengangguran ini bersifat sementara dan umumnya terjadi dalam kondisi ekonomi normal.
- 2) Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi, misalnya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri atau akibat perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia.
- 3) Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi atau resesi. Ketika permintaan barang dan jasa menurun, perusahaan akan mengurangi produksi dan tenaga kerja.
- 4) Pengangguran Musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan musim atau periode tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti sektor pertanian dan pariwisata.

Dalam konteks krisis ekonomi, peningkatan pengangguran biasanya didominasi oleh

pengangguran siklikal akibat penurunan aktivitas ekonomi secara luas (Sukirno, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi sangat berpengaruh terhadap stabilitas pasar tenaga kerja.

Selain itu, tingkat pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dapat memperbesar risiko pengangguran struktural. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyajian Data

Berikut adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir:

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah 2016–2025

No	Tahun	TPT (%)
1	2016	4,63
2	2017	4,57
3	2018	4,47
4	2019	4,44
5	2020	6,48
6	2021	5,95
7	2022	5,57
8	2023	5,13
9	2024	4,78
10	2025	4,66

Data tersebut kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan grafik tren sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2025



3.2. Analisis Tren Periode 2016–2019 (Relatif Stabil dan Menurun Perlahan)

Pada periode sebelum pandemi, yaitu 2016–2019, TPT Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan secara perlahan:

- 2016: 4,63%
- 2017: 4,57% (turun 0,06%)
- 2018: 4,47% (turun 0,10%)
- 2019: 4,44% (turun 0,03%)

Selama empat tahun tersebut, terjadi penurunan total sebesar 0,19 poin persentase.

Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil dan cenderung membaik. Perekonomian Jawa Tengah pada periode ini mampu menyerap tambahan angkatan kerja setiap tahunnya.

Menurut teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan (Jessy Jeray¹, Satria Yoga Putra², 2023).

Stabilitas ini juga menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, perdagangan, serta UMKM berperan penting dalam menjaga keseimbangan pasar kerja di Jawa Tengah.

3.3. Lonjakan Signifikan Tahun 2020 (Dampak Pandemi COVID-19)

Tahun 2020 menunjukkan perubahan paling drastis dalam periode 10 tahun terakhir.

- 2019: 4,44%
- 2020: 6,48%

Terjadi kenaikan sebesar 2,04 poin persentase, yang merupakan lonjakan tertinggi selama satu dekade terakhir.

Kenaikan ini dapat dikategorikan sebagai pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba (Sukirno, 2016).

Pandemi COVID-19 menyebabkan:

- Pembatasan aktivitas ekonomi
- Penurunan produksi industri
- Penutupan usaha kecil dan menengah
- Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK)

International Labour Organization (ILO, 2021) melaporkan bahwa pandemi menyebabkan peningkatan pengangguran secara global akibat kontraksi ekonomi yang tajam. Kondisi ini juga terjadi di Jawa Tengah. Lonjakan 2020 menjadi titik balik (turning point) dalam grafik TPT selama 10 tahun terakhir.

3.4. Periode Pemulihan 2021–2025 (Penurunan Bertahap)

Setelah mencapai puncak pada 2020, TPT mulai menunjukkan tren penurunan secara konsisten:

- 2021: 5,95% (turun 0,53%)
- 2022: 5,57% (turun 0,38%)
- 2023: 5,13% (turun 0,44%)
- 2024: 4,78% (turun 0,35%)
- 2025: 4,66% (turun 0,12%)

Selama periode 2020–2025, terjadi penurunan total sebesar 1,82 poin persentase. Penurunan ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang bertahap.

Sesuai dengan teori Okun's Law, ketika pertumbuhan ekonomi kembali meningkat, tingkat pengangguran akan menurun karena meningkatnya permintaan tenaga kerja (Usman, 2019).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pembukaan kembali sektor industri, serta peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi turut berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran.

3.5. Analisis Pola Jangka Panjang (2016–2025)

Jika dilihat secara keseluruhan, pola grafik menunjukkan tiga fase utama:

- Fase Stabil (2016–2019) → penurunan perlahan
- Fase Krisis (2020) → lonjakan tajam
- Fase Pemulihan (2021–2025) → penurunan bertahap

Menariknya, pada tahun 2025 angka TPT (4,66%) hampir kembali ke kondisi pra-pandemi (2016: 4,63%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu sekitar lima tahun, pasar tenaga kerja Jawa Tengah mampu kembali ke kondisi relatif normal.

Secara struktural, hal ini mengindikasikan bahwa prekonomian Jawa Tengah cukup fleksibel terhadap guncangan eksternal.

Meskipun angkut TPT di Jawa Tengah mulai menunjukkan pemulihan pada 2025, kualitas penyerapan tenaga kerja tetap menjadi catatan penting, mengutip penelitian Ningsih et al. (2025), investasi yang tinggi (terutama di Pulau Jawa) memang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, namun belum tentu mampu menurunkan ketimpangan pendapatan secara drastis jika tidak di barengi SDM yang merata. Hal ini menjelaskan mengapa pertumbuhan di Jawa Tengah seringkali dikategorikan sebagai “Not Pro Jobs Yet” dalam konteks inklusivitas yang maksimal, karena manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

3.6. Perbandingan dengan Tingkat Pengangguran Nasional

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional selama periode 2016–2025 menunjukkan pola yang relatif serupa dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu stabil sebelum pandemi, meningkat tajam pada tahun 2020, dan menurun kembali pada periode pemulihan (BPS, 2023). Sebelum pandemi (2016–2019), TPT nasional berada pada kisaran sekitar 5%– 5,3%, yang secara umum lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran 4,4%–4,6%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, kondisi pasar kerja di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada periode tersebut (BPS, 2023).

Namun pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, TPT nasional meningkat signifikan hingga berada di atas 7%. Kenaikan ini sejalan dengan lonjakan TPT di Jawa Tengah yang mencapai 6,48%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pandemi merupakan guncangan eksternal yang berdampak luas dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia (ILO, 2021). Dengan demikian, kesenjangan antara Jawa Tengah dan rata-rata nasional menjadi relatif tidak terlalu jauh dibandingkan periode sebelumnya.

Memasuki periode pemulihan 2021–2025, baik TPT nasional maupun TPT Jawa Tengah sama-sama menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas ekonomi serta meningkatnya kembali permintaan tenaga kerja. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi, termasuk melalui program padat karya dan dukungan terhadap UMKM, turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ketenagakerjaan (BPS, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun pola pergerakan TPT Jawa Tengah sejalan dengan tren nasional, tingkat pengangguran di Jawa Tengah cenderung berada sedikit di bawah rata-rata

nasional pada sebagian besar periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Tengah relatif cukup resilien dalam menghadapi dinamika ekonomi makro.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah periode 2016–2025, dapat disimpulkan bahwa tren pengangguran mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada periode 2016–2019, TPT cenderung stabil dan menunjukkan tren menurun, yang mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang relatif baik serta kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.

Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan TPT yang cukup tajam sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi dan pembatasan aktivitas masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan teori pengangguran siklikal dalam ekonomi makro yang menyatakan bahwa perlambatan ekonomi dapat meningkatkan jumlah pengangguran (Sukirno, 2016). Fenomena tersebut juga konsisten dengan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menurun akan berdampak pada kenaikan pengangguran (Usman, 2019).

Memasuki periode 2021–2025, TPT di Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yang mengindikasikan adanya proses pemulihan ekonomi. Tren ini sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2023). Secara umum, TPT Jawa Tengah berada sedikit di bawah rata-rata nasional pada beberapa periode sebelum pandemi, yang menunjukkan struktur ekonomi daerah relatif mampu menyerap tenaga kerja dengan cukup baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi TPT di Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, khususnya dampak pandemi, serta efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sektor padat karya, terutama pada industri manufaktur, pertanian modern, dan UMKM, guna meningkatkan daya serap tenaga kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi dan program peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) agar tenaga kerja lebih adaptif terhadap perubahan pasar kerja.

3. Pengembangan ekonomi digital dan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda, untuk menciptakan peluang kerja baru di luar sektor formal.
4. Penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan pemulihan ekonomi tetap sinergis dalam menjaga stabilitas tingkat pengangguran.
5. Pemantauan berkala terhadap data ketenagakerjaan, sehingga kebijakan dapat berbasis data (evidence-based policy).

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjaga tren penurunan TPT di Jawa Tengah serta meningkatkan ketahanan pasar tenaga kerja terhadap guncangan ekonomi di masa mendatang. Selain itu, penurunan TPT di Jawa Tengah perlu didukung oleh inklusi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ningsih et al. (2025), inklusi keuangan mampu mendorong peluang tercapainya pertumbuhan yang inklusif, baik terhadap kesempatan kerja maupun pengurangan ketimpangan. Pemanfaatan teknologi seperti mobile banking dapat menjadi sarana intermediasi bagi masyarakat di daerah pelosok Jawa Tengah untuk mengakses modal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja mandiri melalui sektor UMKM.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2016–2025). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah.
- International Labour Organization. (2021). World employment and social outlook: Trends 2021. International Labour Organization.
- Jeray, J., Putra, S. Y., & Harahap, E. F. (2023). Pengaruh pengangguran, tenaga kerja dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 9(1), 95–103.
- Ningsih, S., Alfisyahri, N., Irawan, D., & Putra, R. (2025). Analisis Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif terhadap Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Menggunakan Pendekatan Panel Simultan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2).
- Rahmanita, C. F., & Usman, U. (2019). Pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di wilayah Sumatera. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12, 31–37.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi ketiga). PT RajaGrafindo Persada.